

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu

Judul penelitian yang diambil ini tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan untuk menyusun penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi, antara lain:

1. Referensi dari Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 20 No. 1: 1-22; ISSN 1979-6471 (2017), yang ditulis oleh Hans Hananto Andreas, Albert Ardeni, dan Paskah Ika Nugroho dengan judul penelitian *Konservatisme Akuntansi Di Indonesia*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua sektor perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2013. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 228 sampel yang diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *company growth*, *profitability*, dan *investment opportunity set* berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah salah satu variabel bebas yang digunakan yaitu set kesempatan investasi (*investment opportunity set*) dan variabel terikat yang digunakan yaitu konservatisme akuntansi. Sedangkan perbedaannya terdapat pada sampel perusahaan yang digunakan. Dimana pada penelitian tersebut menggunakan sampel beberapa perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012 – 2013, sedangkan peneliti menggunakan sampel beberapa perusahaan dari semua industri yang terdaftar di BEI, yang juga sekaligus ikut berpartisipasi dalam penilaian skor CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) periode 2008 – 2010 dan 2013 – 2016. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian

tersebut yaitu mengenai variabel bebas yang diteliti, dimana variabel tersebut belum mencakup semua faktor yang mungkin berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

2. Referensi dari E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 11 No. 3: 646-660; ISSN 2302-8556 (2015), yang ditulis oleh Ni Wayan Noviantari dan Ni Made Dwi Ratnadi dengan judul penelitian *Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Pada Konservatisme Akuntansi*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua sektor perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2013. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 241 sampel yang diperoleh dengan menggunakan metode *stratified random sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial distress* dan *leverage* berpengaruh negatif pada konservatisme akuntansi. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada konservatisme akuntansi. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah variabel bebas yang digunakan yaitu kesulitan keuangan (*financial distress*) dan *leverage* yang merupakan proksi dari kontrak hutang, serta variabel terikat yang digunakan yaitu konservatisme akuntansi. Sedangkan perbedaannya terdapat pada sampel perusahaan yang digunakan. Dimana pada penelitian tersebut menggunakan sampel beberapa perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010 – 2013, sedangkan peneliti menggunakan sampel beberapa perusahaan dari semua industri yang terdaftar di BEI, yang juga sekaligus ikut berpartisipasi dalam penilaian skor CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) periode 2008 – 2010 dan 2013 – 2016. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian tersebut yaitu mengenai variabel bebas yang diteliti, dimana variabel tersebut belum mencakup semua faktor yang mungkin berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

3. Referensi dari *Accounting Analysis Journal* Vol. 2 No. 3: 268-275; ISSN 2252-6765 (2013), yang ditulis oleh Dinny Prastiwi Brilianti dengan judul penelitian *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme Akuntansi Perusahaan*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua sektor perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 – 2010. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 87 sampel yang diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan kepemilikan institusional, *leverage*, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah variabel bebas yang digunakan yaitu kepemilikan manajerial sebagai proksi dari kontrak kompensasi, kepemilikan institusional, dan *leverage* sebagai proksi dari kontrak hutang, serta variabel terikat yang digunakan yaitu konservatisme akuntansi. Sedangkan perbedaannya terdapat pada sampel perusahaan yang digunakan. Dimana pada penelitian ini menggunakan sampel beberapa perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009 – 2010, sedangkan peneliti menggunakan sampel beberapa perusahaan dari semua industri yang terdaftar di BEI, yang juga sekaligus ikut berpartisipasi dalam penilaian skor CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) periode 2008 – 2010 dan 2013 – 2016. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian tersebut yaitu mengenai variabel bebas yang diteliti, dimana variabel tersebut belum mencakup semua faktor yang mungkin berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.
4. Referensi dari *Jurnal Akuntansi Kontemporer* Vol. 1 No. 1: 1-20; (2009), yang ditulis oleh Lodovicus Lasdi dengan judul penelitian *Pengujian Determinan Konservatisme Akuntansi*. Jenis penelitian ini

adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua sektor perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2000 – 2004. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 69 sampel yang diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kontrak hutang dan litigasi berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan kontrak kompensasi, pajak dan biaya politis tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah variabel bebas yang digunakan yaitu kontrak hutang, kontrak kompensasi, litigasi, pajak, dan biaya politis, serta variabel terikat yang digunakan yaitu konservatisme akuntansi. Sedangkan perbedaannya terdapat pada sampel perusahaan yang digunakan. Dimana pada penelitian ini menggunakan sampel beberapa perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2000 – 2004, sedangkan peneliti menggunakan sampel beberapa perusahaan dari semua industri yang terdaftar di BEI, yang juga sekaligus ikut berpartisipasi dalam penilaian skor CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) periode 2008 – 2010 dan 2013 – 2016. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian tersebut yaitu mengenai variabel bebas yang diteliti, dimana variabel tersebut belum mencakup semua faktor yang mungkin berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

5. Referensi dari *Accounting Analysis Journal* Vol. 4 No. 3: 1–10; ISSN 2252-6765 (2015), yang ditulis oleh Fani Risdiyani dan Kusmuriyanto dengan judul penelitian *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme Akuntansi*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2013. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 92 sampel yang diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kepemilikan institusional dan *financial distress* berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan *leverage* dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Sementara itu, kepemilikan manajerial dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah variabel bebas dan variabel terikat yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada sampel perusahaan yang digunakan. Dimana pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011 – 2013, sedangkan peneliti menggunakan sampel perusahaan dari semua sektor yang terdaftar di BEI dan juga sekaligus ikut berpartisipasi dalam penilaian skor CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) periode 2008 – 2010 dan 2013 – 2016. Selain itu, masih terdapat keterbatasan juga dalam penelitian ini yaitu mengenai variabel bebas yang diteliti, dimana variabel tersebut belum mencakup semua faktor yang mungkin berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

6. Referensi dari International Journal Of Economics And Financial Issues Vol. 7 No. 2: 608–619; ISSN 2146-4138 (2017), yang ditulis oleh Amneh Alkurdi, Munther Al-Nimer, dan Mohammad Dabaghia dengan judul penelitian *Accounting Conservatism And Ownership Structure Effect: Evidence From Industrial And Financial Jordanian Listed Companies*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan keuangan dan industri Yordania yang terdaftar di Bursa Efek Amman periode 2005 – 2013. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 891 sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. Sebaliknya, kepemilikan asing dan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan

signifikan terhadap konservatisme akuntansi, tetapi konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah salah satu variabel bebas yang digunakan yaitu kepemilikan institusional, dan variabel terikat yang digunakan yaitu konservatisme akuntansi. Sedangkan perbedaannya terdapat pada sampel perusahaan yang digunakan. Dimana pada penelitian ini menggunakan sampel beberapa perusahaan keuangan dan industri Yordania yang terdaftar di Bursa Efek Amman periode 2005 – 2013, sedangkan peneliti menggunakan sampel beberapa perusahaan dari semua industri yang terdaftar di BEI, yang juga sekaligus ikut berpartisipasi dalam penilaian skor CGPI (Corporate Governance Perception Index) periode 2008 – 2010 dan 2013 – 2016. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian tersebut yaitu mengenai variabel bebas yang diteliti, dimana variabel tersebut belum mencakup semua faktor yang mungkin berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

7. Referensi dari International Business Research Vol. 4 No. 3: 145–155; (2011), yang ditulis oleh Allam Mohammed, Mohammed Hasan, dan Mahmud Hosni dengan judul penelitian *Factors Influencing The Level Of Accounting Conservatism In The Financial Statements*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Kuwait periode 2009. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 225 sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor publik yang mengatur standar akuntansi berhasil memaksa perusahaan – perusahaan Kuwait untuk menyajikan tingkat konservatisme akuntansi yang wajar. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan kecil bersifat konservatif, sedangkan perusahaan besar tidak. Selain itu, kontrak hutang berpengaruh atas laporan keuangan terhadap konservatisme akuntansi. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki hutang lebih rendah lebih konservatif dari pada perusahaan yang

memiliki hutang lebih tinggi. Selain itu, laporan keuangan sektor keuangan di Bursa Efek Kuwait adalah yang paling konservatif. Penelitian ini juga menunjukkan seberapa signifikannya informasi akuntansi di Kuwait. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah salah satu variabel bebas yang digunakan yaitu kontrak hutang, dan variabel terikat yang digunakan yaitu konservatisme akuntansi. Sedangkan perbedaannya terdapat pada sampel perusahaan yang digunakan. Dimana pada penelitian ini menggunakan sampel beberapa perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Kuwait periode 2009, sedangkan peneliti menggunakan sampel beberapa perusahaan dari semua industri yang terdaftar di BEI, yang juga sekaligus ikut berpartisipasi dalam penilaian skor CGPI (Corporate Governance Perception Index) periode 2008 – 2010 dan 2013 – 2016. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian tersebut yaitu mengenai variabel bebas yang diteliti, dimana variabel tersebut belum mencakup semua faktor yang mungkin berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

8. Referensi dari Journal Of Accounting and Economics Vol. 53: 98–114; (2012), yang ditulis oleh Santhosh Ramalingegowda dan Yong Yu dengan judul penelitian *Institutional Ownership And Conservatism*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Amerika Serikat periode 1995 – 2006. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 16.911 sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusi yang lebih tinggi yang kemungkinan memantau manajer dikaitkan dengan laporan keuangan yang lebih konservatif. Hubungan positif ini lebih menonjol di antara perusahaan dengan pilihan pertumbuhan yang lebih banyak dan asimetris informasi yang lebih tinggi. Test lead-lag menghasilkan bukti yang konsisten bahwa kepemilikan institusi mengarah pada konservatisme. Secara bersamaan, hasil ini konsisten dengan lembaga institusi yang menuntut

konservatisme. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah variabel bebas yang digunakan yaitu kepemilikan institusional, dan variabel terikat yang digunakan yaitu konservatisme akuntansi. Sedangkan perbedaannya terdapat pada sampel perusahaan yang digunakan. Dimana pada penelitian ini menggunakan sampel beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Amerika Serikat periode 2009, sedangkan peneliti menggunakan sampel beberapa perusahaan dari semua industri yang terdaftar di BEI, yang juga sekaligus ikut berpartisipasi dalam penilaian skor CGPI (Corporate Governance Perception Index) periode 2008 – 2010 dan 2013 – 2016. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian tersebut yaitu mengenai variabel bebas yang diteliti, dimana variabel tersebut belum mencakup semua faktor yang mungkin berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Konservatisme Akuntansi

2.2.1.1. Pengertian Konservatisme Akuntansi

Menurut Watts (2003) dalam Savitri (2016:22), konservatisme adalah prinsip kehati – hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu – buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan yang terjadi. Pendapat lain mengatakan bahwa konservatisme adalah pengakuan awal untuk biaya dan rugi serta menunda pengakuan untuk pendapatan dan keuntungan (Givoly dan Hayn, 2000 dalam Savitri, 2016:23). Kemudian, menurut Suwardjono (2014:245), konservatisme akuntansi adalah :

“Sikap atau aliran (mazhab) dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan (*outcome*) yang terjelek dari ketidakpastian tersebut. Sikap konservatif juga mengandung makna sikap berhati – hati dalam menghadapi resiko dengan cara bersedia mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan resiko.”

Definisi resmi dari FASB (*Financial Accounting Standards Board*) dalam Glosarium Pernyataan Konsep No. 2 dalam Savitri (2016:23), konservatisme adalah reaksi yang hati – hati (*prudent reaction*) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup dipertimbangkan. Kemudian, menurut Smith dan Skousen (2007) dalam Savitri (2016:31), konservatisme adalah sebuah aturan ketika terdapat keragu – ragan akan beberapa alternatif pilihan pelaporan akuntansi, maka hendaklah dipilih alternatif yang paling memberikan dampak paling rendah terhadap ekuitas pemilik.

Dari beberapa pengertian konservatisme akuntansi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konservatisme akuntansi adalah sikap kehati – hatian dalam pembuatan laporan keuangan untuk mengantisipasi ketidakpastian yang ada dalam dunia bisnis dan mempertimbangkan alternatif – alternatif yang dapat dilakukan atas risiko tersebut, serta penerapannya dalam laporan keuangan yaitu dengan menunda pengakuan pendapatan atau laba dan mempercepat pengakuan biaya atau rugi. Konservatisme akuntansi juga dapat dikatakan sebagai suatu perilaku yang pesimistik.

Konservatisme dapat dibedakan menjadi 2 jenis, walaupun penyebutannya berbeda – beda, namun secara konsep hanya akan mengacu pada kedua jenis tersebut. Menurut Chan *et al.* (2009) dalam Savitri (2016:36), 2 jenis konservatisme yaitu konservatisme *ex ante* (*unconditional*) dan konservatisme *ex post* (*conditional*). Konservatisme *ex ante* atau *unconditional conservatism* adalah konservatisme yang berdasarkan akuntansi, terkait dengan neraca, dan tidak terkait atau bergantung pada terdapatnya berita (baik atau buruk) –artinya konservatisme jenis ini bersifat *independent* dari adanya berita baik atau berita buruk di lingkungan bisnis perusahaan. Secara akuntansi, konservatisme jenis ini misalnya adalah karena tidak melakukan pencatatan *goodwill* atau melakukan pembebanan yang relatif cepat terhadap aktivitas R&D, aktivitas pemasaran (periklanan) atau penggunaan metode

pengalokasian yang bersifat akselerasi (depresiasi saldo menurun ganda), sehingga akibatnya dapat terjadi nilai buku aset yang *understated*. Konservatisme jenis ini menghasilkan *earnings* yang lebih *persistent* (konsisten dalam jangka panjang) karena konservatisme yang dilakukan terkandung dalam kebijakan akuntansi yang dilakukan, dimana konsistensi perlakuan akuntansinya relatif lebih konsisten.

Di sisi lain, menurut Basu (1997) dalam Savitri (2016:36), konservatisme *ex post* atau *conditional conservatism* adalah konservatisme yang berdasarkan kondisi pasar, terkait dengan *earnings* dan bergantung pada berita (*news dependent*), maksudnya adalah bahwa konservatisme bentuk ini merupakan reaksi atau tanggapan dari perusahaan yang melakukan verifikasi yang berbeda sebagai penyerapan informasi yang terdapat dalam lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi *earnings* perusahaan berkaitan dengan informasi yang dapat berakibat pada terdapatnya *gains* dan *losses* ekonomis. Akuntansi bersifat konservatif bila pengakuan terhadap berita yang mengindikasikan adanya *losses* ekonomis lebih tepat waktu (*timely*) dibandingkan pengakuan terhadap *gains* ekonomis dan dapat juga mencakup suatu tingkat tertentu dari diskresi manajerial yang dilakukan oleh seorang manajer yang tercermin di dalam laporan keuangan karena manajer dapat menentukan *timing* dan jumlah dari *asset write-down* atau *restructuring charges* yang diakui. Dalam hal ini, efek dari konservatisme kondisional terhadap aliran *earnings* dapat kurang *persistent* (konsisten dalam jangka panjang) dan lebih sulit bagi investor untuk mendeteksi konservatisme jenis ini.

Kemudian, menurut Subramanyam (2010:92), 2 jenis konservatisme yaitu:

1. Konservatisme Tak Bersyarat (*Unconditional Conservatism*), yaitu bentuk akuntansi konservatisme yang diaplikasikan secara konsisten dalam dewan direksi. Hal ini mengarah kepada nilai aset yang lebih rendah secara perpetual. Contoh dari konservatisme tak bersyarat adalah akuntansi untuk penelitian dan pengembangan (R&D). Beban R&D dihapuskan ketika sudah terjadi, meskipun ia mempunyai potensi ekonomis. Oleh

karena itu, aset bersih dari perusahaan yang melakukan R&D secara intensif akan selalu lebih rendah (*understated*).

2. Konservatisme Bersyarat (*Conditional Conservatism*), yaitu mengacu kepada pepatah lama “semua kerugian diakui secepatnya, tetapi keuntungan hanya diakui saat benar – benar terjadi”. Contoh konservatisme bersyarat adalah menurunkan nilai aset seperti PPE atau *goodwill* apabila nilainya mengalami penurunan secara ekonomis, yaitu pengurangan potensi arus kasnya meningkat dikemudian hari, maka kita tidak dapat serta merta menaikkan nilainya karena laporan keuangan hanya mencerminkan kenaikan potensi arus kas selama periode secara perlahan, dan hal itu dilakukan apabila arus kas benar-benar terjadi.

2.2.1.2. Teori Yang Mendasari Konservatisme Akuntansi

Berikut ini adalah beberapa teori yang mendasari konservatisme akuntansi, antara lain:

1. Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Menurut Chariri dan Ghazali (2007) dalam Alfian dan Sabeni (2013), teori akuntansi positif adalah paham maksimalisasi kemakmuran (*wealth maximization*) dan kepentingan individu. Kemudian, menurut Belkaoui (2011), teori positif didasarkan pada proposisi bahwa manajer, pemegang saham, dan regulator (politisi) adalah rasional dan mereka berusaha untuk memaksimalkan utility mereka, yang secara langsung terkait dengan kompensasi dan kemakmuran mereka. Sehingga dalam teori ini menjelaskan bahwa manajer memiliki sifat untuk memaksimalkan kemakmurannya sendiri. Teori ini juga menjelaskan bahwa kenaikan laba dapat menutupi kinerja buruk manajer. Menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam Oktomegah (2012), terdapat tiga hipotesis dalam teori ini yang dapat menjelaskan keputusan manajemen untuk bertindak konservatif atau tidak. Hipotesis tersebut yaitu:

- a. Hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypothesis*), yaitu berkaitan dengan tindakan manajemen dalam memilih metode akuntansi untuk memaksimalkan laba demi

mendapatkan bonus yang tinggi. Manajemen yang diberikan janji untuk mendapatkan bonus sehubungan dengan performa perusahaan khususnya terkait dengan laba perusahaan yang diperolehnya akan termotivasi untuk mengakui laba perusahaan yang seharusnya menjadi bagian di masa mendatang, diakui menjadi laba perusahaan pada tahun berjalan.

- b. Hipotesis perjanjian hutang (*debt covenant hypothesis*), yaitu dalam melakukan perjanjian hutang, perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan oleh debitor agar dapat mengajukan pinjaman. Beberapa persyaratan tersebut adalah persyaratan atas kondisi tertentu mengenai keuangan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan dapat tercermin dari rasio-rasio keuangannya. Kreditor memiliki persepsi bahwa perusahaan yang memiliki nilai laba yang relatif tinggi dan stabil merupakan salah satu kriteria perusahaan yang sehat.
- c. Hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*), yaitu akibat politis dari pemilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar tuntutan masyarakat terhadap perusahaan tsb. Perusahaan yang berukuran besar diharapkan akan memberikan perhatian yang lebih terhadap lingkungan sekitarnya dan terhadap pemenuhan atas peraturan yang diberlakukan regulator.

Menurut Chariri dan Ghazali (2007) dalam Widayati (2011), dalam teori akuntansi positif terdapat tiga hubungan keagenan, yaitu:

- a. Hubungan manajemen dengan pemilik (pemegang saham), yaitu manajemen akan cenderung menerapkan akuntansi yang kurang konservatif atau optimis apabila kepemilikan

saham yang ada di perusahaan (manajerial) lebih rendah dibandingkan dengan kepemilikan saham eksternal. Agen atau manajer tersebut ingin agar kinerjanya dinilai bagus dan mendapatkan bonus (*bonus plan*), maka manajer cenderung meningkatkan laba periode berjalan. Namun, prinsipal atau pemegang saham hanya menginginkan deviden maupun *capital gain* dari saham yang dimilikinya. Sebaliknya, jika kepemilikan manajerial lebih tinggi dibanding pemegang saham eksternal, maka manajemen cenderung melaporkan laba yang lebih konservatif. Adanya rasa memiliki dari manajer terhadap perusahaan yang tinggi membuat manajer lebih berkeinginan untuk memperbesar perusahaan. Penerapan akuntansi yang konservatif menyebabkan terdapat cadangan dana tersembunyi yang cukup besar untuk dapat meningkatkan investasi perusahaan. Aset akan diakui dengan nilai terendah, sehingga nilai pasar lebih besar daripada nilai buku dan terbentuklah *goodwill*.

- b. Hubungan manajemen dengan kreditor, yaitu apabila rasio hutang atau ekuitas perusahaan tinggi maka kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang konservatif atau yang cenderung menurunkan laba semakin besar. Hal ini dikarenakan kreditor dapat mengawasi kegiatan operasional manajemen, sehingga pihaknya meminta manajemen agar melaporkan laba yang konservatif demi keamanan dananya.
- c. Hubungan manajemen dengan pemerintah, yaitu manajer akan cenderung melaporkan laba secara konservatif atau secara hati-hati untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, para analis, dan masyarakat. Perusahaan yang besar akan lebih disoroti oleh pihak – pihak tersebut dibanding perusahaan kecil. Perusahaan besar harus dapat menyediakan layanan publik dan tanggung jawab sosial

yang lebih baik kepada masyarakat sebagai tuntutan dari pemerintah dan juga membayar pajak yang lebih tinggi sesuai dengan laba perusahaan yang tinggi.

2. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Retnaningtyas (2016:40), teori agensi adalah hubungan kontraktual antara dua pihak atau lebih yang salah satu pihak disebut prinsipal (*principal*) yang menyewa pihak lain yang disebut agen (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang. Pendapat lain mengatakan bahwa teori agensi dalam perusahaan mengidentifikasikan adanya pihak – pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan (Anthony dan Govindarajan, 2005 dalam Deviyanti, 2012:14-15). Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa dalam teori agensi terdapat konflik kepentingan antara prinsipal dan agen yang dapat dilihat dalam hubungan antara pemegang saham, kreditor, dan investor sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen, dimana masing – masing pihak ingin saling memaksimalkan kemakmurannya. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa agen dapat mengambil tindakan yang tidak sejalan dengan kepentingan prinsipalnya, misalnya seperti manajer akan lebih memilih metode akuntansi yang tidak konservatif agar laba perusahaan meningkat dan kinerja mereka dinilai baik oleh prinsipal. Dalam hal ini, tentunya agen memiliki lebih banyak informasi dibanding prinsipal, sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi. Adanya informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer inilah yang dapat memicu untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan pribadinya. Bagi prinsipal, akan sangat sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajer

karena hanya memiliki sedikit informasi. Menurut Scott (2009) ada dua macam asimetri informasi yaitu:

1. *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang – orang dalam lainnya memiliki lebih banyak pengetahuan tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan dengan pihak luar. Informasi mengenai fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tidak disampaikan oleh manajer kepada pemegang saham.
2. *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun kreditor. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan yang melanggar kontrak dan secara etika atau norma tidak layak untuk dilakukan di luar sepengetahuan pemegang saham.

2.2.1.3. Alasan Penerapan Konservatisme

Menurut Hendriksen (1982) dalam Savitri (2016:38), alasan konservatisme dilakukan karena:

1. Kecenderungan untuk bersikap pesimis dianggap perlu untuk mengimbangi optimisme yang mungkin berlebihan dari para manajer dan pemilik sehingga kecenderungan lebih – lebihkan dalam pelaporan relatif dapat dikurangi.
2. Laba dan penilaian (*valuation*) yang dinyatakan terlalu tinggi (*overstatement*) lebih berbahaya bagi perusahaan dan pemiliknya daripada penyajian yang bersifat kerendahan (*understatement*) dikarenakan risiko untuk menghadapi tuntutan hukum karena dianggap melaporkan hal yang tidak benar menjadi lebih besar.
3. Akuntan kenyataannya lebih mampu memperoleh informasi yang lebih banyak dibandingkan mampu mengkomunikasikan informasi tersebut selengkap mungkin yang dapat dikomunikasikan kepada para investor dan kreditor, sehingga akuntan menghadapi 2 macam risiko yaitu risiko bahwa apa yang dilaporkan ternyata tidak benar dan risiko bahwa apa yang tidak dilaporkan ternyata benar.

2.2.1.4. Pro Dan Kontra Konservatisme

Sampai dengan saat ini, penerapan prinsip konservatisme masih menimbulkan pro dan kontra karena sebagian pihak menganggap prinsip konservatisme dapat membuat angka – angka yang terdapat dalam laporan

keuangan cenderung bias dan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya serta laporan keuangan tersebut dianggap menjadi tidak relevan dan andal. Berikut ini adalah pandangan yang bertentangan mengenai konservatisme akuntansi, yaitu:

1. Akuntansi Konservatif Bermanfaat

Akuntansi konservatif akan menguntungkan dalam kontrak-kontrak antara pihak – pihak dalam perusahaan maupun dengan luar perusahaan. Konservatisme dapat membatasi tindakan manajer untuk membesar – besarkan laba serta memanfaatkan informasi yang asimetri ketika menghadapi klaim atas aset perusahaan (Givoly dan Hayn, 2000 dalam Savitri, 2016:34).

Seperti pendapat yang telah dikemukakan di atas, bahwa alasan untuk mendukung atau pro terhadap penerapan konservatisme dalam pembuatan laporan keuangan dikarenakan mereka menganggap bahwa hal tersebut dapat mengurangi perilaku oportunistik dari manajer.

2. Akuntansi Konservatif Tidak Bermanfaat

Menurut Basu (1997) dalam Savitri (2016:35), konservatisme dianggap sebagai sistem akuntansi yang bias. Pendapat ini dipicu oleh definisi akuntansi yang mengakui biaya dan kerugian lebih cepat, mengakui pendapatan dan keuntungan lebih lambat, menilai aktiva dengan nilai terendah, dan kewajiban dengan nilai yang tertinggi. Selain itu konservatisme menghasilkan kualitas laba yang rendah dan kurang relevan dimana konservatisme mempengaruhi kualitas angka – angka yang dilaporkan di neraca maupun laba dalam laporan laba rugi.

Seperti pendapat yang telah dikemukakan di atas, bahwa alasan untuk tidak mendukung atau kontra terhadap penerapan konservatisme dalam pembuatan laporan keuangan dikarenakan konservatisme dianggap dapat membuat laporan keuangan menjadi bias dan tidak andal karena tidak menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Penerapan prinsip konservatisme juga akan menciptakan cadangan yang

tidak tercatat, sehingga memungkinkan manajemen lebih leluasa melaporkan angka laba di masa mendatang.

2.2.1.5. Pengukuran Konservatisme Akuntansi

Menurut Watts (2003) dalam Savitri (2016:45), konservatisme dibagi menjadi 3 pengukuran, yaitu:

1. Earning / Stock Return Relation Measure

Stock market price berusaha untuk merefleksikan perubahan nilai aset pada saat terjadinya perubahan, baik perubahan atas rugi ataupun laba tetap dilaporkan sesuai dengan waktunya. Basu (1997) menyatakan bahwa konservatisme menyebabkan kejadian – kejadian yang merupakan kabar buruk atau kabar baik terefleksi dalam laba yang tidak sama (asimetri waktu pengakuan). Hal ini disebabkan karena kejadian yang diperkirakan akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan harus segera diakui sehingga mengakibatkan *bad news* lebih cepat terefleksi dalam laba dibandingkan *good news*.

2. Earning / Accrual Measure

Givoly dan Hayn (2000) memfokuskan efek konservatisme pada laporan laba rugi selama beberapa tahun. Mereka berpendapat bahwa konservatisme menghasilkan akrual negatif yang terus menerus. Akrual yang dimaksud adalah perbedaan antara laba bersih sebelum depresiasi / amortisasi dan arus kas kegiatan operasi. Semakin besar akrual negatif maka akan semakin konservatif akuntansi yang diterapkan. Hal ini dilandasi oleh teori bahwa konservatisme menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan biaya. Dengan begitu, laporan laba rugi yang konservatif akan menunda pengakuan pendapatan yang belum terealisasi dan biaya yang terjadi pada periode tersebut dibandingkan dan dijadikan cadangan pada neraca.

Sebaliknya laporan keuangan yang optimis akan cenderung memiliki laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan arus kas operasi sehingga akrual yang dihasilkan adalah positif. Depresiasi dikeluarkan dari *net income* dalam perhitungan CONACC karena depresiasi merupakan alokasi biaya dari aktiva yang dimiliki perusahaan. Pada saat pembelian aset, kas yang dibayarkan termasuk dalam arus kas dari kegiatan investasi dan bukan dari kegiatan operasi. Dengan demikian alokasi biaya depresiasi yang ada dalam net income tidak berhubungan dengan kegiatan operasi dan harus dikeluarkan dari perhitungan.

3. *Net Asset Measure*

Dalam pengukuran ini melihat pada nilai aset yang *understatement* dan kewajiban yang *overstatement*. Salah satu model pengukurannya adalah proksi pengukuran yang digunakan oleh Beaver dan Ryan (2000), yaitu dengan menggunakan *market to book ratio* yang mencerminkan nilai pasar relatif terhadap nilai buku perusahaan. Rasio yang bernilai lebih dari 1, mengindikasikan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya.

Dari ketiga pengukuran di atas, dalam penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan pengukuran *earning / accrual measure* karena penelitian ini lebih memfokuskan konservatisme akuntansi dalam kaitannya dengan laba rugi, bukan dengan reaksi pasar, sehingga model akrual tepat untuk digunakan. Berikut adalah rumus yang digunakan (Givoly dan Hayn, 2000 dalam Savitri, 2016:52):

$$\text{CONACC} = \frac{(\text{NIO} + \text{DEP} - \text{CFO}) \times (-1)}{\text{TA}}$$

Keterangan:

CONACC : Konservatisme akuntansi berdasarkan akrual

NIO : Laba operasi tahun t

DEP : Depresiasi aset tetap tahun t

CFO : Arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun t

TA : Nilai buku total aset tahun t

2.2.2. Konvergensi IFRS

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konvergensi adalah keadaan menuju satu titik pertemuan. Atau dapat dikatakan bahwa konvergensi adalah penggabungan dua hal atau lebih untuk bertemu dan bersatu dalam satu titik. Sedangkan IFRS (*International Financial Reporting Standard*) adalah seperangkat standar akuntansi global yang dikembangkan oleh *International Accounting Standard Board* (IASB) untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan (Warren, *et al.*, 2014). IASB adalah badan independen yang membuat peraturan akuntansi yang dapat digunakan oleh berbagai negara dengan tujuan mengembangkan seperangkat standar akuntansi global. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konvergensi IFRS adalah penggabungan atau pengintegrasian standar akuntansi yang ada di setiap negara untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan yaitu IFRS. Tujuan dilakukannya konvergensi IFRS adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di semua negara dengan mengacu pada suatu standar utama yang sama serta dapat meningkatkan arus investasi global melalui laporan keuangan yang dapat diperbandingkan antar satu negara dengan negara lainnya.

Menurut Martani, *et al.*, (2012:16) IFRS sebagai standar internasional memiliki tiga ciri utama yaitu:

1. *Principles – Based*

Standar yang menggunakan *principles – based* hanya mengatur hal – hal yang pokok dalam standar sedangkan prosedur dan kebijakan detail diserahkan kepada pemakai. Standar mengatur prinsip pengakuan sesuai substansi ekonomi, tidak didasarkan pada ketentuan detail dalam atribut kontrak perjanjian. Sedangkan standar yang *rule – based*, memuat ketentuan pengakuan akuntansi secara

detail. Keunggulan pendekatan ini akan menghindari dibuatnya perjanjian atau transaksi mengikuti peraturan dalam konsep pengakuan. Penyusunan laporan keuangan dapat merancang suatu transaksi sehingga dapat diakui secara akuntansi dan bukan melihat dari substansi ekonomi dari transaksi tersebut. Namun, standar yang bersifat *principles – based* mengharuskan pemakainya untuk membuat penilaian (*adjustment*) yang tepat atas suatu transaksi untuk menentukan substansi ekonominya dan menentukan standar yang tepat untuk transaksi tersebut.

2. Nilai Wajar

Standar akuntansi banyak menggunakan konsep nilai wajar (*fair value*). Penggunaan nilai wajar untuk meningkatkan relevansi informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. Informasi nilai wajar lebih relevan karena menunjukkan nilai terkini. Hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep harga perolehan yang mendasarkan penilaian pada nilai perolehan pertama (*historical cost*). Banyak pengakuan akuntansi saat ini yang dasar penilaiannya masih menggunakan *historical cost*. IFRS membuka peluang penggunaan nilai wajar yang lebih luas untuk beberapa item, seperti aset tetap dan aset tak berwujud, dibuka opsi penggunaan nilai wajar selain nilai perolehan. Nilai wajar lebih relevan namun harga perolehannya diyakini lebih *reliable*.

3. Pengungkapan

Mengharuskan lebih banyak pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengungkapan diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat mempertimbangkan informasi yang relevan dan perlu diketahui terkait dengan apa yang dicantumkan dalam laporan keuangan dan kejadian penting yang terkait dengan item tersebut. Pengungkapan dapat berupa kebijakan akuntansi, rincian detail, penjelasan penting, dan komitmen.

Menurut Warren *et al.*, (2014) Indonesia secara resmi mengadopsi IFRS untuk perusahaan Indonesia sejak 2008 dan secara efektif diterapkan pada tahun 2012. Tujuan dari pengadopsian IFRS tersebut adalah agar PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) memiliki isi yang sama dengan IFRS, dimana pengadopsian tersebut dilakukan secara bertahap (*gradual strategy*). Adapun alasan Indonesia melakukan konvergensi IFRS adalah karena Indonesia tidak bisa menolak arus globalisasi yang ada dalam perekonomian internasional, dan juga tidak lepas dari adanya tekanan besar pada Indonesia atas penerimaan luas IFRS di seluruh dunia, serta agar laporan

keuangan Indonesia dapat diakui secara internasional yang nantinya dapat memudahkan Indonesia untuk mendapatkan investasi asing. Berikut adalah manfaat konvergensi IFRS secara umum:

1. Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan yang dikenal secara internasional (*enhance comparability*).
2. Meningkatkan arus investasi global melalui transparansi.
3. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang *fund raising* melalui pasar modal secara global.
4. Menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan.
5. Meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan antara lain, mengurangi kesempatan untuk melakukan *earning management*. (Zamzami, 2011)

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa salah satu ciri utama dari IFRS yaitu pengukuran atau penilaian dengan menggunakan nilai wajar atau *fair value*. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan prinsip konservatisme, dimana metode penilaian yang sangat konservatif adalah dengan menggunakan biaya historis (*historical cost*), karena pada prinsipnya suatu perusahaan akan mengabaikan kemungkinan adanya perubahan nilai dari suatu akun terutama yang bersifat menguntungkan bagi perusahaan (*gain*). Karena sesuai dengan prinsipnya, konservatisme adalah menunda pengakuan pendapatan atau keuntungan dimana pendapatan atau keuntungan tersebut masih mengandung unsur ketidakpastian. Oleh karena itu, belum selesainya pro dan kontra mengenai penerapan prinsip konservatisme, sekarang dengan adanya konvergensi IFRS di Indonesia maka muncul lah pro dan kontra lainnya, yaitu mengenai berbagai pihak yang merasa bahwa setelah adanya konvergensi IFRS maka penerapan prinsip konservatisme jadi berkurang atau bahkan menghilang. Namun di sisi lain berbagai pihak mengatakan bahwa justru dengan adanya konvergensi IFRS maka penerapan prinsip konservatisme justru malah meningkat.

2.2.3. Set Kesempatan Investasi (Investment Opportunity Set)

2.2.3.1. Pengertian Set Kesempatan Investasi

Menurut Tandelilin (2010:2), investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang. Pendapat lain mengatakan bahwa investasi adalah bentuk pengelolaan dana guna memberikan keuntungan dengan cara menempatkan dana tersebut pada alokasi yang diperkirakan akan memberikan tambahan keuntungan atau *compounding* (Fahmi, 2015:6). Jadi, dapat disimpulkan bahwa investasi adalah penggunaan atau pengalokasian sejumlah aset pada saat ini untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.

Sedangkan pengertian dari set kesempatan investasi (*investment opportunity set*) adalah nilai kesempatan investasi dan merupakan pilihan untuk membuat investasi dimasa yang akan datang. *Investment opportunity set* ini berkaitan dengan peluang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang (Haryetti dan Ekayanti, 2012). Myers (1977) dalam Yakub, *et al.*, (2014) menyatakan:

“Istilah *Investment Opportunity Set* (IOS) pertama kali diperkenalkan oleh Myers (1977) yang menguraikan perusahaan sebagai suatu kombinasi antara aktiva riil (*assets in place*) dan opsi investasi di masa depan. Opsi investasi di masa depan kemudian dikenal dengan istilah IOS atau set kesempatan investasi. IOS sebagai opsi investasi di masa depan dapat ditunjukkan dengan kemampuan perusahaan yang lebih tinggi di dalam mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan.”

Menurut Gaver dan Gaver (1993) dalam Aristantia (2015), IOS adalah beban yang dikeluarkan oleh pihak manajemen yang mencerminkan nilai perusahaan sesuai dengan kebijakan dari manajemen itu sendiri. IOS juga dapat digunakan sebagai pilihan investasi saat ini dan diharapkan akan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Jadi, dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa set kesempatan investasi (*investment opportunity set*) adalah sejumlah pilihan atau luasnya kesempatan atau peluang investasi bagi suatu perusahaan guna untuk mendapatkan

keuntungan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pilihan perusahaan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi haruslah tepat agar kelangsungan hidup perusahaan tidak terganggu dan tujuan perusahaan melakukan investasi dapat tercapai.

2.2.3.2. Jenis – Jenis Proksi Set Kesempatan Investasi

Menurut Gaver dan Gaver (1993) dalam Afriadi (2016), IOS bersifat tidak dapat diobservasi karena sifat IOS yang merupakan variabel tersembunyi (*latent*), hal ini lah yang mengindikasikan bahwa IOS tidak dapat diobservasi. Oleh karena itu, untuk dapat mengukur IOS maka diperlukan proksi yang dapat dihubungkan dengan variabel lain dalam perusahaan. Menurut Subekti dan Kusuma (2001) dalam Andriyani (2008) menyatakan bahwa proksi yang dapat digunakan untuk mengukur *investment opportunity set*, yaitu sebagai berikut:

“Bahwa proksi pertumbuhan perusahaan dengan nilai IOS yang telah digunakan oleh para peneliti seperti Gaver dan Gaver (1993), Jones dan Sharna (2001) dan Kallapur dan Trombley (2001) secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok berdasarkan faktor – faktor yang digunakan dalam mengukur nilai – nilai IOS tersebut. Klasifikasi IOS tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Proksi berdasarkan harga
- b. Proksi berdasarkan investasi
- c. Proksi berdasarkan varian”

Berikut adalah penjelasan dari masing – masing proksi tersebut:

- a. Proksi IOS berdasarkan harga

Proksi ini menyatakan bahwa prospek pertumbuhan perusahaan sebagian dinyatakan dalam harga pasar. Proksi ini berdasarkan gagasan bahwa prospek pertumbuhan perusahaan secara parsial dinyatakan dalam harga – harga saham, dan perusahaan yang tumbuh akan mempunyai nilai pasar yang relatif lebih tinggi untuk aset – aset yang dimiliki (*assets in place*) dibandingkan dengan perusahaan yang tidak tumbuh. IOS yang didasari pada harga akan berbentuk suatu rasio sebagai suatu ukuran aset yang

dimiliki dan nilai pasar perusahaan. Menurut Kusuma (2008), proksi – proksi berdasarkan harga yang telah digunakan dalam beberapa penelitian antara lain yaitu: *market to book value of asset (MVA/BVA)*, *market to book value of equity (MVE/BVE)*, *Tobin's Q*, *price to earning ratio (PER)*, *ratio property, plant, and equipment to firm value (PPE/BVA)*, *ratio firm value depreciation*, dan *market value of equity plus book value of debt (MVEPBVD)*.

b. Proksi IOS berdasarkan investasi

Proksi ini percaya pada gagasan bahwa suatu level kegiatan investasi yang tinggi berkaitan secara positif pada nilai IOS suatu perusahaan. Perusahaan dengan IOS yang tinggi juga akan mempunyai tingkat investasi yang sama tinggi, yang dapat dikonversi menjadi aset yang dimiliki. Kegiatan investasi tersebut diharapkan mampu memberikan peluang atau kesempatan investasi yang semakin besar pula di masa berikutnya. Menurut Kusuma (2008), proksi – proksi yang sering digunakan dalam beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan proksi investasi, antara lain: *ratio of R&D to assets*, *ratio R&D to sales*, *ratio of capital expenditure to firm value assets (CAP/MVA)*, *investment to sales ratio*, *ratio of capital expenditure to book value assets (CAP/BVA)*, *investment to earning ratio*, *log of firm value* dan *ratio current assets to net sales (CAONS)*.

c. Proksi IOS berdasarkan varian

Proksi ini percaya pada gagasan bahwa suatu opsi akan menjadi lebih bernilai jika menggunakan variabilitas ukuran untuk memperkirakan besarnya opsi yang tumbuh, seperti variabilitas imbal hasil (*return*) yang mendasari peningkatan aset. Menurut Kusuma (2008), ukuran yang digunakan dalam beberapa

penelitian antara lain: *variance of return*, *asset betas*, dan *the variance of asset deflated sales*.

2.2.3.3. Proksi Set Kesempatan Investasi Yang Digunakan

Dari ketiga jenis proksi yang telah dijelaskan sebelumnya, proksi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah proksi berdasarkan investasi yaitu *Capital Expenditure to Book Value Assets (CAP/BVA)*. Alasan penggunaan proksi ini adalah karena proksi ini dapat melihat besarnya aliran tambahan modal saham perusahaan. Dimana, dengan tambahan modal saham ini perusahaan dapat memanfaatkannya untuk tambahan investasi aset produktifnya, sehingga berpotensi sebagai perusahaan yang tumbuh. Para investor dapat melihat seberapa besar aliran modal tambahan suatu perusahaan dengan membagi *capital expenditure* dengan total aset. Semakin besar aliran tambahan modal saham, semakin besar kemampuan perusahaan untuk memanfaatkannya sebagai tambahan investasi, sehingga perusahaan tersebut mempunyai kesempatan untuk dapat bertumbuh. Dengan demikian akan mengakibatkan kenaikan harga saham pada perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan *return* yang diterima para pemegang saham.

Menurut Kusuma (2008), rumus yang digunakan untuk mengukur IOS dengan menggunakan proksi berdasarkan investasi yaitu CAP/BVA, adalah sebagai berikut:

$$\text{CAP/BVA} = \frac{\text{Nilai Buku Aset Tetap}_t - \text{Nilai Buku Aset Tetap}_{t-1}}{\text{Jumlah Aset}}$$

2.2.4. Kepemilikan Institusional

2.2.4.1. Pengertian Kepemilikan Institusional

Menurut Nabela (2012:2) kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan presentase. Kemudian menurut Nuraina (2012:116) kepemilikan

institusional adalah presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, dana pensiunan, atau perusahaan lain). Pendapat lainnya menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi (pemerintah, perusahaan asing, lembaga keuangan seperti asuransi, bank, dan dana pensiun) yang terdapat pada perusahaan (Mahariana dan Ramantha, 2014). Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga lain seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan perusahaan lain, yang dinyatakan dalam bentuk presentase.

Kepemilikan institusional merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi adanya *agency conflict*, karena dengan adanya kepemilikan institusional ini pengawasan akan manajemen perusahaan menjadi lebih optimal. Kemampuan kepemilikan institusional sebagai agen pengawas dapat ditentukan melalui besarnya investasi mereka, dimana semakin besar presentase saham yang dimiliki institusional maka pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efektif karena hal tersebut dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer dan mengurangi *agency cost*. Selain itu, apabila institusi tersebut merasa tidak puas dengan kinerja manajerial, maka mereka dapat menjual sahamnya ke pasar. Hal ini lah yang mendorong para manajer untuk bertindak lebih hati – hati dalam pengambilan keputusan.

2.2.4.2. Pengukuran Kepemilikan Institusional

Menurut Pujiati (2009), variabel kepemilikan institusional diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki institusi lain di luar perusahaan minimal 10% terhadap total saham perusahaan. Berikut adalah rumus yang digunakan:

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah Saham Yang Dimiliki Institusional}}{\text{Total Keseluruhan Saham}} \times 100$$

2.2.5. Kesulitan Keuangan (*Financial Distress*)

2.2.5.1. Pengertian Kesulitan Keuangan

Menurut Plat dan Plat dalam Fahmi (2013:158), *financial distress* adalah:

“Sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. *Financial distress* dimulai dengan ketidakmampuan memenuhi kewajiban – kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas.”

Menurut Yustika, *et al.*, (2015), *financial distress* adalah:

“Kondisi dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau krisis. *Financial distress* memiliki hubungan yang erat dengan kebangkrutan pada suatu perusahaan, karena *financial distress* adalah tahap dimana kondisi keuangan perusahaan mengalami penurunan sebelum terjadinya kebangkrutan.”

Menurut Ross, *et al.*, (2013:956), *financial distress* adalah:

“Financial distress is a situation where a firm’s operating cash flows are not sufficient to satisfy current obligations (such as trade credits or interest expenses) and the firm is forced to take corrective action. Financial distress may lead a firm to default on a contract, and it may involve financial restructuring between the firm, its creditors, and its equity investors. Usually the firm is forced to take actions that it would not have taken if it had sufficient cash flow.”

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesulitan keuangan (*financial distress*) adalah kondisi keuangan perusahaan yang sedang mengalami penurunan atau sedang dalam kondisi tidak sehat atau krisis, dimana ditandai dengan ketidakmampuan arus kas dari aktivitas operasi perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dan merupakan tahap awal sebelum kebangkrutan.

2.2.5.2. Jenis – Jenis Kesulitan Keuangan

Menurut Cornett, *et al.*, (2012:655), *financial distress* dikategorikan menjadi 3 tipe, yaitu:

1. *Business Failure*

Kegagalan bisnis adalah jenis kesulitan keuangan dimana perusahaan tidak lagi berada dalam dunia bisnis. Namun kesulitan keuangan tidak secara otomatis berarti akhir dari perusahaan. Tingkat kesulitan keuangan lainnya juga ada.

2. *Economic Failure*

Kegagalan ekonomi adalah jenis kesulitan keuangan dimana pengembalian atas aset perusahaan lebih kecil dari biaya modal perusahaan. Dengan demikian, perusahaan tidak cukup mendapatkan asetnya untuk membayar para pemasok dana yang telah mereka janjikan pembayarannya.

3. *Technical Insolvency*

Ketidaksanggupan teknis adalah jenis kesulitan keuangan dimana arus kas operasi perusahaan tidak cukup untuk membayar kewajibannya ketika jatuh tempo. Dalam kasus ini, perusahaan dapat terus berjalan dan akhirnya menjadi perusahaan yang berkembang.

2.2.5.3. Penyebab Kesulitan Keuangan

Menurut Sudana (2011:249), penyebab terjadinya *financial distress* adalah:

“Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami kegagalan, diantaranya adalah faktor ekonomi, kesalahan manajemen, dan bencana alam. Perusahaan yang mengalami kegagalan dalam operasinya akan berdampak pada kesulitan keuangan. Tapi kebanyakan penyebabnya, baik langsung maupun tidak langsung adalah karena kesalahan manajemen yang terjadi berulang-ulang.”

Kemudian pendapat lain menyatakan bahwa penyebab *financial distress* adalah:

“Dimulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban – kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas. Permasalahan terjadinya *insolvency* bisa timbul karena berawal dari kesulitan likuiditas. Ketidakmampuan tersebut dapat ditunjukkan dengan 2 (dua) metode, yaitu *stock – based insolvency* dan *flow – based insolvency*. *Stock – based insolvency* adalah kondisi yang menunjukkan suatu kondisi ekuitas negatif dari neraca perusahaan (*negative net worth*), sedangkan *flow – based insolvency* ditunjukkan oleh kondisi arus kas operasi (*operating cash flow*) yang tidak dapat memenuhi kewajiban – kewajiban lancar perusahaan” (Fahmi, 2013:184).

2.2.5.4. Pengukuran Kesulitan Keuangan

Salah satu metode pengukuran yang digunakan untuk memprediksi *financial distress* adalah dengan menggunakan model *Altman's Z-score*. Menurut Fahmi (2013:158):

“Pada saat ini banyak formula yang dikembangkan untuk menjawab permasalahan tentang *bankruptcy* ini, salah satu yang dianggap populer dan banyak dipergunakan dalam berbagai penelitian serta analisis secara umum adalah model kebangkrutan Altman. Model Altman ini atau lebih umum disebut dengan *Altman Z-score*.”

Model *financial distress* diskriminan Altman (*Z-Score*) dinyatakan oleh Supardi (2013: 79), analisis diskriminan Altman merupakan suatu model statistik yang dikembangkan oleh Altman yang kemudian berhasil merumuskan rasio – rasio *financial distress* terbaik dalam memprediksi terjadinya kebangkrutan perusahaan. Dalam penggunaannya, model Altman ini tidak bersifat tetap melainkan berkembang dari waktu ke waktu, dimana pengujian dan penemuan model terus diperluas oleh Altman hingga penerapannya tidak hanya pada perusahaan manufaktur publik saja tapi sudah mencakup perusahaan manufaktur non publik, perusahaan non manufaktur, dan perusahaan obligasi korporasi.

Perkembangan model Altman (2006) dalam Ramadhani dan Lukviarman (2009:15-28), dikatakan terdapat 3 model Altman, yakni model Altman pertama yang ditujukan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan publik manufaktur. Kemudian Altman melakukan penyesuaian agar model prediksi kebangkrutan ini tidak hanya dapat digunakan oleh perusahaan manufaktur yang *go public* saja, tetapi juga dapat diaplikasikan untuk perusahaan – perusahaan di sektor swasta. Lalu, seiring berjalannya waktu dan penyesuaian terhadap berbagai jenis perusahaan, kemudian Altman melakukan modifikasi modelnya agar dapat diterapkan pada semua perusahaan, seperti manufaktur, non manufaktur, dan perusahaan penerbit obligasi di negara berkembang (*emerging market*). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari ketiga model Altman tersebut menunjukkan hasil bahwa model Altman yang pertama lah yang

memberikan tingkat prediksi kebangkrutan yang paling tinggi. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Hanafi (2003:274-276), dimana Model Altman *Z-Score* yang setelah direvisi mempunyai kemampuan prediksi yang cukup baik yaitu (94% benar atau 62 benar dari total sampel 66), sedangkan model Altman *Z-score* yang pertama memiliki kemampuan prediksi sebesar (95% benar atau 63 benar dari 66 sampel).

Berdasarkan penjelasan di atas, makna peneliti menentukan untuk menggunakan model Altman *Z-Score* yang pertama kali dicetuskan oleh Altman, karena dianggap model tersebut lebih baik dalam memprediksi *financial distress*. Berikut adalah rumus yang digunakan (Altman, 2006 dalam Ramadhani dan Lukviarman, 2009:15-28):

$$Z = 1.2 X_1 + 1.4 X_2 + 3.3 X_3 + 0.6 X_4 + 1.0 X_5$$

Keterangan:

X_1 = Modal Kerja/Total Aset

X_2 = Laba Ditahan/Total Aset

X_3 = Laba Sebelum Bunga Dan Pajak/Total Aset

X_4 = Nilai Pasar Saham Biasa Dan Preferen/Nilai Buku Total Hutang

X_5 = Penjualan/Total Aset

Z = Nilai *Z-Score*

Nilai Z dikategorikan sebagai berikut:

$Z > 2,99$ = Tidak Mengalami Kebangkrutan

$1,8 \leq Z \leq 2,99$ = Ragu – ragu

$Z < 1,8$ = Mengalami Kebangkrutan

Berikut adalah penjelasan dari rasio – rasio yang digunakan dalam model Altman *Z-Score*:

1. Rasio Likuiditas (X_1)

Menurut Brigham dan Houston (2014:102) rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan kas perusahaan dan aset lancar lainnya terhadap kewajiban lancar. Menurut Subramanyam dan Wild (2009:529) menyatakan bahwa:

“Modal kerja adalah ukuran likuiditas yang paling banyak digunakan. Modal kerja didefinisikan sebagai kelebihan aset lancar atas kewajiban lancarnya. Hal ini penting sebagai ukuran aset yang likuid yang menyediakan pengamanan untuk kreditor. Hal ini juga penting dalam mengukur cadangan likuid yang tersedia untuk memenuhi kontijensi dan ketidakpastian seputar saldo perusahaan antara arus kas masuk dan arus kas keluar.”

Rasio likuiditas merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Perusahaan yang mampu membiayai kewajiban jangka pendeknya tergolong perusahaan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu rasio ini dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam melihat tingkat kesulitan keuangan perusahaan.

2. Rasio Profitabilitas (X_2)

Menurut Horne dan Wachowicz (2009:173) rasio profitabilitas ada 2 maksud yaitu satu menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan dan satu lagi menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Secara bersamaan, rasio ini menunjukkan keefektifan dari seluruh operasi perusahaan. Dapat dikatakan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan untuk mengukur harapan dari tingkat keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam memenuhi target yang ingin dicapainya.

3. Rasio Rentabilitas Ekonomis (X_3)

Menurut Sawir (2009:19) rasio rentabilitas ekonomis adalah rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang menunjukkan rentabilitas ekonomis perusahaan. Atau dapat dikatakan bahwa rentabilitas ekonomis menunjukkan seberapa besar kemampuan aset yang dimiliki untuk menghasilkan tingkat pengembalian atau pendapatan atau dengan kata lain rentabilitas ekonomis menunjukkan kemampuan total aset dalam menghasilkan laba.

4. Rasio Penilaian Pasar (X_4)

Menurut Hanafi (2009:110) rasio penilaian pasar adalah rasio yang melihat perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap nilai buku perusahaan. Rasio penilaian pasar berhubungan dengan nilai pasar dari perusahaan sebagaimana diukur oleh harga pasar terhadap nilai akuntansi tertentu. Jadi dapat dikatakan bahwa rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban – kewajibannya dari nilai pasar modal sendiri.

5. Rasio Aktivitas (X_5)

Menurut Brigham dan Houston (2014:105) menyatakan bahwa rasio manajemen aset adalah rasio yang mengukur seberapa efektif suatu perusahaan dalam mengelola asetnya. Menurut Sartono (2010:120), perputaran aset menunjukkan bagaimana efektivitas perusahaan menggunakan keseluruhan aset untuk menciptakan penjualan dan mendapatkan laba. Rasio ini menunjukkan apakah perusahaan menghasilkan volume bisnis yang cukup dibandingkan investasi dalam total asetnya. Rasio ini juga mencerminkan efisiensi manajemen dalam menggunakan keseluruhan aset perusahaan untuk menghasilkan penjualan dan mendapatkan laba.

2.2.6. Kontrak Hutang

2.2.6.1. Pengertian Kontrak Hutang

Menurut Alvian dan Sabeni (2013) kontrak hutang (*debt covenant*) adalah:

“Perjanjian untuk melindungi kreditor dari perilaku manajer terhadap kepentingan kreditor, seperti pinjaman tambahan, pembagian dividen yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas dan kekayaan pemilik berada di bawah tingkat yang telah ditentukan, yang mana semua menaikkan resiko bagi kreditor yang telah ada.”

Pendapat lain mengatakan bahwa kontrak hutang adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditor untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman (Cochran, 2001 dalam Nugroho, 2012). Kemudian menurut Harahap (2012) kontrak hutang adalah perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan – tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor, seperti membagi dividen yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas di bawah tingkat yang ditentukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kontrak hutang adalah kontrak atau perjanjian antara perusahaan dengan kreditor guna melindungi kreditor dari tindakan oportunistik manajer, seperti pembagian dividen yang berlebihan atau membiarkan ekuitas berada di bawah tingkat yang telah ditentukan.

2.2.6.2. Pengukuran Kontrak Hutang

Untuk mengidentifikasi *debt covenant* adalah dengan menggunakan proksi dari tingkat *leverage* (total hutang/total aset) (Qiang, 2003 dalam Lasdi, 2009). Pengertian dari *leverage* sendiri adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang (Kasmir, 2008:151). Artinya adalah seberapa besar beban hutang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek

maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Apabila perusahaan tidak mempunyai *leverage* atau *leverage* faktornya sama dengan nol artinya perusahaan sepenuhnya menggunakan modal sendiri atau tanpa menggunakan hutang dalam beroperasi. Jadi, semakin besar proposi hutang yang digunakan oleh perusahaan, maka pemilik modal akan menanggung risiko yang semakin besar pula.

Berikut adalah rumus *leverage* yang digunakan (Kasmir, 2014:156):

$$Debt\ Ratio = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Aset}$$

2.2.7. Kontrak Kompensasi

2.2.7.1. Pengertian Kontrak Kompensasi

Menurut Hasibuan (2012:118), kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Selain itu, pendapat lain menyatakan bahwa kompensasi adalah konsep yang lebih luas, yaitu semua bentuk kembalian atau imbalan (*return*) finansial, jasa – jasa berwujud dan tujuan – tujuan yang diperoleh sebagai hasil dari sebuah hubungan kepegawaian (Sunyoto, 2008:69). Menurut Sastrohadiwiry (2003) dalam Yuniarsih (2011: 125), kompensasi adalah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan perusahaan kepada para tenaga kerja, karena para tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran mereka demi kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi, dapat dikatakan bahwa kompensasi adalah segala bentuk imbalan atau balas jasa yang diterima oleh seorang karyawan atas jasanya yang telah diberikan kepada suatu perusahaan guna tercapainya tujuan perusahaan.

Dari beberapa pengertian di atas mengenai kompensasi, maka dapat disimpulkan bahwa kontrak kompensasi adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat antara perusahaan dengan karyawan sebagai bentuk imbalan atau balas jasa atas kerja sama yang dilakukan dan jasa yang telah diberikan untuk perusahaan guna tercapainya tujuan perusahaan. Salah satu bentuk kompensasi yang diberikan adalah insentif atau bonus. Dalam hal ini pemilik bertindak sebagai prinsipal sedangkan manajer bertindak sebagai agen. Seperti yang telah dikemukakan dalam teori agensi, dimana dengan adanya pemisahan tersebut maka akan menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen karena masing – masing pihak akan berupaya untuk memaksimalkan kesejahteraannya. Hal ini dikarenakan adanya dorongan dari manajer untuk mendapatkan bonus dan agar kinerjanya terlihat baik.

Hal tersebut tentunya akan berbeda apabila manajer juga memiliki saham pada perusahaan tersebut, dengan kata lain manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Tentunya dalam hal pengambilan keputusan manajer akan bertindak untuk menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dan pemegang saham. Oleh karena itu, kepemilikan manajerial sangatlah penting dalam hal ini untuk mengetahui apakah manajer bertindak untuk kepentingannya sendiri atau untuk kepentingan bersama. Maka, kepemilikan manajerial digunakan sebagai proksi dari kontrak kompensasi.

Pengertian dari kepemilikan manajerial sendiri adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer atau dengan kata lain manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham (Imanta dan Satwiko, 2011:68). Kemudian menurut Faizal (2011), kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, diukur oleh proporsi saham yang dimiliki manajer pada akhir tahun yang dinyatakan dalam %. Dari kedua pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer yang dinyatakan dalam %.

2.2.7.2. Pengukuran Kontrak Kompensasi

Dalam mengukur kontrak kompensasi yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial digunakan rumus sebagai berikut (Efendi, 2013):

$$\text{MAN} = \frac{\text{Jumlah Saham Yang Dimiliki Manajemen}}{\text{Total Keseluruhan Saham}} \times 100$$

2.2.8. Litigasi

2.2.8.1. Pengertian Litigasi

Litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan di mana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan. Dalam hal ini tentunya perselisihan yang dimaksud adalah dalam bidang akuntansi. Hal ini biasanya dapat disebabkan karena penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang dapat merugikan pihak – pihak berkepentingan lainnya. Jadi dapat diartikan juga litigasi adalah risiko tuntutan hukum yang melekat pada perusahaan dikarenakan pihak – pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti investor, kreditor, dan regulator merasa dirugikan.

Misalnya saja dari sisi kreditor, risiko litigasi kemungkinan timbul apabila perusahaan tidak mampu membayar hutang – hutangnya yang telah diberikan kreditor. Kemudian dari sisi investor, kemungkinan risiko litigasi timbul apabila perusahaan tidak menjalankan operasinya dengan benar sehingga berakibat pada pergerakan harga saham di pasar modal, yang berujung pada kerugian yang diterima oleh investor karena tidak mendapat *return* yang sesuai dengan besarnya investasi yang mereka lakukan. Dan apabila dilihat dari sisi regulator (dalam hal ini adalah pemerintah), maka kemungkinan timbulnya risiko litigasi adalah apabila perusahaan melakukan penggelapan pajak atau dengan kata lain perusahaan tidak membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya. Oleh karena itu risiko litigasi berpotensi

menimbulkan biaya yang tidak sedikit karena berurusan dengan masalah hukum.

2.2.8.2. Pengukuran Litigasi

Menurut Watts (2003a) dalam Lasdi (2009), pengukuran litigasi diproksikan dengan menggunakan pertumbuhan aset (*assets growth*). Penggunaan ukuran ini dikarenakan pernyataan aset yang berlebihan cenderung menghasilkan biaya litigasi yang besar dibandingkan dengan pernyataan aset yang rendah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar kepada perusahaan. Secara otomatis hal tersebut juga meningkatkan risiko litigasi dari pihak luar apabila ternyata hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan malah mendapat kerugian. Berikut adalah rumus yang digunakan (Weston dan Copeland, 2008):

$$Assets\ Growth = \frac{Total\ Aset_t - Total\ Aset_{t-1}}{Total\ Aset_{t-1}}$$

2.2.9. Pajak

2.2.9.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang – Undang No. 16 tahun 2009 mengenai ketentuan umum tata cara perpajakan, definisi pajak yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), definisi pajak adalah:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Pendapat lain mengatakan definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Suandy, 2014:9). Dari beberapa pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa pajak adalah kontribusi atau iuran wajib kepada negara yang dilakukan baik oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kemakmuran rakyat.

2.2.9.2. Fungsi Pajak

Menurut Suandy (2011:12), fungsi pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi Finansial (*budgeter*)
Memasukkan uang sebanyak – banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Sebagai contoh penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- b. Fungsi Mengatur (*reguler*)
Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dapat dilihat dari beberapa contoh sebagai berikut:
 - 1) Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
 - 2) Pengenaan pajak ekspor untuk produk – produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
 - 3) Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk – produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk – produk dalam negeri.

2.2.9.3. Pengukuran Pajak

Pengukuran pajak dalam penelitian ini kaitannya adalah dengan pajak penghasilan. Dimana dasar yang dijadikan acuan dalam menghitung pembayaran pajak penghasilan atas suatu badan usaha adalah laba perusahaan pada tahun berjalan yang ditunjukkan dalam laporan keuangan perusahaan. Besarnya laba yang disajikan akan dikalikan dengan tarif PPh (Pajak Penghasilan) badan yang berlaku. Oleh karena itu besar kecilnya laba perusahaan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya pembayaran pajak penghasilan perusahaan.

Besaran laba perusahaan secara tidak langsung juga berkaitan dengan ukuran perusahaan. Perusahaan yang besar akan lebih diperhatikan oleh pemerintah, sehingga pemerintah sebagai regulator negara di mana perusahaan tersebut berdiri akan mendorong perusahaan untuk membayar pajak yang lebih tinggi apabila laba yang disajikan dalam laporan keuangan juga tinggi. Secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pemerintah. Dimana dari sisi manajemen perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang rendah, dan hal ini berbanding terbalik dengan keinginan dari pemerintah. Sehingga dengan adanya konflik kepentingan tersebut, manajer akan berusaha untuk menerapkan konservatisme akuntansi karena dengan penerapan prinsip konservatisme yang menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan beban akan secara otomatis menyajikan laba yang lebih rendah dalam laporan keuangan, dan secara otomatis pula pembayaran pajak penghasilan perusahaan pun menjadi lebih kecil.

Oleh karena itu, pengukuran pajak dalam penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan tapi dilihat dari *sales growth* seperti yang telah dilakukan oleh Lasdi (2009). Berikut adalah rumus yang digunakan (Kasmir, 2012:107):

$$Sales\ Growth = \frac{Total\ Sales_t - Total\ Sales_{t-1}}{Total\ Sales_{t-1}}$$

2.2.10. Biaya Politis

2.2.10.1. Pengertian Biaya Politis

Menurut Lasdi (2009) menyatakan bahwa:

“Biaya politis timbul dari konflik kepentingan antara perusahaan (manajer) dengan pemerintah sebagai kepanjangan tangan masyarakat yang memiliki wewenang untuk melakukan pengalihan kekayaan dari perusahaan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Proses pengalihan kekayaan tersebut biasanya menggunakan informasi akuntansi, seperti laba.”

Maka dari itu, perusahaan menjadi terdorong untuk menerapkan prinsip konservatisme akuntansi. Manajer perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengecilkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi biaya politis yang potensial (Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Lasdi, 2009). Jadi, semakin besar biaya politis yang dihadapi perusahaan maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk menggunakan pilihan metode akuntansi yang dapat memperkecil laba. Hal ini dikarenakan semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan maka akan semakin mendapat perhatian dari pemerintah sehingga dapat mengakibatkan meningkatnya biaya politis.

2.2.10.2. Pengukuran Biaya Politis

Seperti yang telah dilakukan oleh peneliti – peneliti terdahulu, bahwa untuk pengukuran biaya politis sering diproksikan dengan ukuran perusahaan. Pengertian dari ukuran perusahaan itu sendiri menurut Machfoedz (1994) dalam Widaryanti (2009) adalah:

“Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aset, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain). Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*) dan perusahaan kecil (*small firm*).”

Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka kemungkinan akan semakin besar pula biaya politis yang dihadapi, karena semakin besar ukuran perusahaan biasanya menjadi lebih diawasi oleh pemerintah. Oleh

karena itu, perusahaan semakin terdorong untuk menerapkan prinsip konservatisme. Pengukuran biaya politis yang diproksikan dengan ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggunakan total aset. Seperti yang dinyatakan oleh Prasetyantoko (2008:257), aset total dapat menggambarkan ukuran perusahaan, semakin besar aset biasanya perusahaan tersebut semakin besar. Berikut adalah rumus yang digunakan (Murhadi, 2013):

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{LN Total Assets}$$

2.2.11. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

2.2.11.1. Pengertian Tata Kelola Perusahaan

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), *corporate governance* didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dalam Hery (2010) menyatakan bahwa:

“*Corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”

Pendapat lain mengatakan bahwa *corporate governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan dan masyarakat sekitar (Tunggal, 2012:24). Jadi, dapat dikatakan bahwa tata kelola perusahaan (*corporate governance*) adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai

dengan kepentingan semua pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan dan agar tujuan perusahaan dapat tercapai.

2.2.11.2.Prinsip – Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) dalam Subramanyam *et al.*, (2008), adalah sebagai berikut:

1. **Transparansi (*Transparency*)**
Keterbukaan / transparansi adalah prinsip dimana persamaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, hal ini untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya, perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya sekedar masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang – undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditor dan pemangku kepentingan lainnya.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**
Akuntabilitas adalah prinsip dimana perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. **Responsibilitas (*Responsibility*)**
Responsibilitas adalah prinsip dimana perusahaan harus mematuhi peraturan perundang – undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
4. **Independensi (*Independency*)**
Independensi adalah prinsip dimana untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing- masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat di intervensi oleh pihak lain.
5. **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**
Kewajaran dan kesetaraan adalah prinsip dimana dalam melaksanakan kegiatannya, harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.2.11.3. Pengukuran Tata Kelola Perusahaan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diterbitkan oleh lembaga riset *independent The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) untuk mengukur tata kelola perusahaan. CGPI digunakan karena dapat dijadikan sebagai indikator atau standar mutu yang ingin dicapai perusahaan dalam bentuk pengakuan dari masyarakat terhadap penerapan prinsip – prinsip GCG (Windah dan Andono, 2013). Pengertian dari CGPI sendiri adalah program riset dan pemeringkatan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan – perusahaan di Indonesia melalui perancangan riset yang mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan konsep *Corporate Governance* (CG) dengan melaksanakan evaluasi dan *benchmarking* sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan. Berikut adalah beberapa indikator yang menjadi penilaian dalam menentukan nilai CGPI:

- a. Transparansi
- b. Akuntabilitas
- c. Responsibilitas
- d. Independen
- e. Keadilan
- f. Komitmen
- g. Kepemimpinan
- h. Strategi
- i. Etika
- j. Visi, Misi, Nilai, Makna
- k. Budaya
- l. Organisasi Pembelajar

Sebagai hasil dari penilaian CGPI tersebut akan diimplementasikan dengan skor dan predikat yang mewakili *range* dari skor tersebut, yaitu sebagai berikut:

55,00 – 69,99	“Cukup Terpercaya”
70,00 – 84,99	“Terpercaya”
85,00 – 100	“Sangat Terpercaya”

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Set Kesempatan Investasi Terhadap Konservatisme Akuntansi

Dwitayanti dan Fahlevi (2015) berpendapat bahwa set kesempatan investasi (IOS) merupakan sekumpulan keputusan investasi dalam bentuk aset yang dimiliki dan pilihan investasi masa depan. Dan menyatakan adanya hubungan antara *Investment Opportunity Set* (IOS) dan konservatisme akuntansi. Roychowdhury dan Watts (2006) dalam Saputri (2013), memberikan gambaran tentang hubungan antara *Investment Opportunity Set* (IOS) dan konservatisme akuntansi. Akuntansi secara tradisional tidak merespon perubahan nilai pertumbuhan dan aset tak berwujud perusahaan. Akuisisi dan perubahan nilai akibat penurunan nilai dari aset biasanya tidak dicatat kecuali secara eksternal diperoleh dan dapat diverifikasi (seperti *goodwill* manajer dan akuisisi). Konsekuensinya apabila terjadi penurunan nilai aset yang tidak dicatat, maka perusahaan tidak dapat mengakuinya.

Hal tersebut mengarahkan perusahaan pada tingkat konservatisme yang rendah terutama ketika nilai perusahaan dipengaruhi oleh nilai pertumbuhan dan nilai aset tidak berwujud perusahaan. Maka dari itu, secara singkat dapat dikatakan bahwa set kesempatan investasi yang semakin besar atau tinggi akan rawan dengan adanya penurunan nilai aset terutama aset tidak berwujud yang tidak diakui, dan secara otomatis berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Sehingga hal ini menunjukkan semakin tinggi set kesempatan investasi maka akan semakin tinggi juga tingkat konservatisme akuntansinya (Saputri, 2013).

2.3.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Konservatisme Akuntansi

Menurut Pratanda (2014), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. Semakin besar kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka semakin kuat juga pengawasan yang dilakukan oleh institusi lain terhadap kinerja manajemen perusahaan. Hal itu dilakukan untuk menekan perilaku oportunistik dari manajer, seperti untuk mengejar bonus. Sehingga semakin besar porsi kepemilikan institusional maka semakin besar pula tekanan bagi perusahaan untuk menerapkan prinsip konservatisme akuntansi.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Harahap (2012) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip akuntansi yang konservatif pada penyusunan laporan keuangan akan semakin tinggi apabila kepemilikan saham oleh pihak institusional tinggi. Investor institusional akan memiliki hak yang lebih besar sehingga investor institusional akan mengawasi tindakan dan kinerja manajemen lebih ketat, sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba dan cenderung meminta manajemen untuk menerapkan akuntansi yang konservatif, dan terhindar dari penyajian laba yang *overstatement*. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan semakin tinggi juga penerapan konservatisme akuntansi.

2.3.3. Pengaruh Kesulitan Keuangan Terhadap Konservatisme Akuntansi

Menurut Pramudita (2012), kesulitan keuangan (*financial distress*) adalah munculnya sinyal atau gejala – gejala awal kebangkrutan terhadap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan, atau juga kondisi yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Dalam teori akuntansi positif menyebutkan bahwa manajer akan cenderung

mengurangi penerapan konservatisme akuntansi apabila perusahaan mengalami tingkat kesulitan keuangan (*financial distress*) yang tinggi (Suprihastini dan Pusparini, 2007 dalam Noviantari dan Ratnadi, 2015). *Financial distress* dapat mendorong pemegang saham untuk mengganti manajer perusahaan karena kinerja manajer dianggap buruk dan tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik, sehingga hal ini secara otomatis mendorong manajer untuk mengurangi penerapan konservatisme akuntansi dan justru cenderung melakukan manajemen laba agar kinerjanya dapat terlihat baik dan agar dapat menarik kreditor ataupun investor agar mau menanamkan dananya kepada perusahaan agar perusahaan tetap dapat bertahan dan tidak bangkrut. Sehingga seperti yang dinyatakan oleh Lo (2005) dalam Noviantari dan Ratnadi (2015), bahwa semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan maka mendorong manajer untuk menyajikan laporan keuangan yang semakin tidak konservatif.

2.3.4. Pengaruh Kontrak Hutang Terhadap Konservatisme Akuntansi

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam Nugroho (2012), menyatakan bahwa dalam teori akuntansi positif terdapat tiga hipotesis, salah satunya yaitu hipotesis kontrak hutang (*debt covenant hypothesis*). *Debt covenant hypothesis* menyatakan bahwa manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba (Sweeney, 1994 dalam Ayuningsih *et al.*, 2016). Menurut Oktomegah (2012), *debt covenant* memprediksi bahwa manajer cenderung untuk menyatakan laba dan aset secara berlebihan untuk mengurangi renegotiasi biaya kontrak hutang ketika perusahaan berusaha melanggar kontrak hutangnya, dan manajer juga tidak ingin kinerjanya dinilai kurang baik apabila laba yang dilaporkan konservatif. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lasdi (2009) dimana penggunaan *leverage* sebagai proksi dari *debt covenant* yang menunjukkan kecenderungan perusahaan untuk melanggar perjanjian hutang. Sari dan Adhariani (2009) menyatakan bahwa semakin tinggi rasio *leverage* maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan akan menggunakan prosedur yang meningkatkan laba yang dilaporkan. Sehingga

dapat dikatakan bahwa semakin tinggi *debt covenant* maka semakin rendah penerapan prinsip konservatisme akuntansi.

2.3.5. Pengaruh Kontrak Kompensasi Terhadap Konservatisme Akuntansi

Kepemilikan manajerial merupakan proksi dari kontrak kompensasi. Pengertian dari kepemilikan manajerial sendiri adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan (Pratanda, 2014). Struktur kepemilikan manajerial yang tinggi dibanding dengan pihak eksternal perusahaan akan menyebabkan perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang konservatif. Hal ini dikarenakan manajemen memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang juga sekaligus untuk memenuhi keinginannya sendiri, jadi tidak hanya memikirkan besarnya bonus yang akan didapat tapi juga mementingkan kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*).

Begitupun sebaliknya, apabila kepemilikan manajerialnya rendah maka manajer lebih cenderung tidak konservatif agar kinerjanya terlihat baik oleh pihak eksternal perusahaan. Hal ini dikarenakan pihak investor akan percaya bahwa mereka akan mendapat dividen yang besar dari laba yang tinggi yang ditunjukkan dalam laporan keuangan dan dapat menarik calon investor lainnya. Selain itu manajer juga akan mendapatkan bonus yang besar apabila laba yang ditunjukkan tinggi karena itu menunjukkan bahwa kinerja manajer baik. Hal ini lah yang mendorong manajer akan melaporkan laba lebih besar (Suaryana, 2008). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial maka semakin tinggi pula penerapan konservatisme akuntansi.

2.3.6. Pengaruh Litigasi Terhadap Konservatisme Akuntansi

Menurut Juanda (2007) dalam Dewi *et al.*, (2014), risiko litigasi adalah risiko bawaan perusahaan yang mempunyai kemungkinan untuk terjadinya suatu ancaman hukum (litigasi) oleh pihak yang merasa dirugikan terkait kepentingan perusahaan. Menurut Seetharaman *et al.*, (2002) dalam Juanda

(2009), terdapat tiga upaya untuk mendorong dalam pengungkapan informasi agar terhindar dari tuntutan dan ancaman litigasi yaitu memilih kebijakan akuntansi yang cenderung konservatif, menunda berita baik, dan pengungkapan berita buruk dengan segera dalam laporan keuangan. Pernyataan yang berlebihan dari aset bersih cenderung menghasilkan biaya litigasi yang lebih besar dibandingkan dengan pernyataan aset bersih yang lebih rendah. Penerapan konservatisme akuntansi dengan menyatakan aset bersih yang lebih rendah dapat mengurangi risiko litigasi (Watts, 2003a dalam Lasdi 2009).

Risiko litigasi juga didukung oleh lingkungan hukum suatu wilayah. Dimana pada lingkungan hukum yang sangat ketat, maka manajer cenderung menyajikan laporan keuangannya secara konservatif agar terhindar dari ancaman tuntutan hukum atau litigasi. Begitupun sebaliknya, pada lingkungan hukum yang longgar maka dorongan manajer untuk menyajikan laporan keuangan secara konservatif akan berkurang (Francis *et al.*, 1994 dalam Nugroho, 2012). Berbagai peraturan dan penegakan hukum yang berlaku dalam lingkungan akuntansi, menuntut manajer untuk lebih mencermati praktik – praktik akuntansi agar terhindar dari ancaman tuntutan hukum. Tuntutan penegakan hukum yang semakin ketat inilah yang dapat berpotensi menimbulkan litigasi bila perusahaan melakukan pelanggaran sehingga akan semakin mendorong manajer untuk bersikap konservatif dalam menyajikan laporan keuangannya. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin tinggi risiko ancaman litigasi maka semakin tinggi juga dorongan manajer untuk menerapkan konservatisme akuntansi.

2.3.7. Pengaruh Pajak Terhadap Konservatisme Akuntansi

Pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan sangat berkaitan dengan laba perusahaan dan ukuran perusahaan. Dimana ukuran perusahaan secara tidak langsung dapat memberikan opini bagi pemerintah bahwa ukuran perusahaan berkaitan dengan laba perusahaan yang berujung pada besaran pajak penghasilan perusahaan. Misal seperti perusahaan besar biasanya memberikan opini bahwa perusahaan tersebut dapat menghasilkan

laba yang besar pula apabila dibandingkan dengan perusahaan kecil, yang nantinya akan berdampak pada besarnya pembayaran pajak penghasilan perusahaan tersebut. Salah satu unsur penting dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya yang sangat berpengaruh terhadap besaran laba perusahaan adalah penjualan. Dimana semakin besar penjualan maka kemungkinan besar laba yang dihasilkan pun akan besar pula, dan otomatis pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan pun besar.

Dalam penelitian ini, pengukuran pajak dengan menggunakan proksi ukuran perusahaan yang dilihat dari pertumbuhan penjualan (*sales growth*) diharapkan mampu menunjukkan kemampuan perusahaan dari waktu ke waktu dan dapat dijadikan prediksi pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Dimana tingginya tingkat pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun secara otomatis dapat menunjukkan juga peningkatan laba perusahaan yang berujung pada peningkatan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Namun dalam hal pembayaran pajak penghasilan ini terdapat konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pemerintah dimana pemerintah menginginkan perusahaan dapat melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar sesuai dengan laba yang dihasilkan namun dari sisi manajer justru menginginkan pembayaran pajak penghasilan yang rendah. Oleh karena itu, pengukuran pertumbuhan penjualan ini diharapkan dapat melihat apakah semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan maka semakin tinggi pula penerapan konservatisme akuntansi. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Widya (2004) dalam Dewi *et al.*, (2014) bahwa suatu perusahaan dengan pajak yang besar akan cenderung memilih akuntansi yang konservatif.

2.3.8. Pengaruh Biaya Politis Terhadap Konservatisme Akuntansi

Sama halnya seperti pajak, biaya politis juga berkaitan dengan ukuran perusahaan. Dimana perusahaan besar biasanya mendapat pengawasan yang lebih dari pemerintah dan masyarakat sehingga menghadapi biaya politis lebih besar dibanding perusahaan kecil. Biaya politis mencakup semua biaya (transfer kekayaan) yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan

tindakan politis antara lain seperti pajak, tuntutan buruh, dan lain sebagainya. Proses pengalihan kekayaan tersebut biasanya menggunakan informasi akuntansi, seperti laba perusahaan.

Jika perusahaan besar menghasilkan laba yang besar secara relatif permanen, maka pemerintah dapat terdorong untuk menaikkan pajak dan meminta layanan publik yang lebih tinggi kepada perusahaan (Lo, 2005 dalam Wilantoro, 2010). Hal ini lah yang mendorong manajemen perusahaan untuk menerapkan konservatisme akuntansi. Manajer memiliki kecenderungan untuk memperkecil laba yang disajikan dalam laporan keuangan guna mengurangi biaya politis yang potensial (Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Lasdi, 2009). Timbulnya biaya politis ini juga disebabkan karena adanya konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan pengalihan kekayaan dari perusahaan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku baik peraturan perpajakan maupun peraturan lainnya (Oktomegah, 2012). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi biaya politis yang dihadapi perusahaan maka semakin tinggi penerapan konservatisme akuntansi.

2.3.9. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi

Tata kelola perusahaan (*corporate governace*) merupakan suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan kepentingan semua pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan dan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Dalam penelitian ini tata kelola perusahaan diukur dengan menggunakan indikator *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diterbitkan oleh lembaga riset independen *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Hasil dari indeks tersebut dapat menunjukkan apakah suatu perusahaan sudah memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan terpercaya.

Kaitannya dengan konservatisme akuntansi yaitu apabila perusahaan telah memiliki tata kelola yang baik dan terpercaya maka cenderung perusahaan tersebut akan menerapkan konservatisme akuntansi dalam penyajian laporan keuangannya. Dan begitu pun sebaliknya, apabila perusahaan belum memiliki tata kelola yang baik dan terpercaya maka perusahaan cenderung tidak menerapkan konservatisme akuntansi. Hal ini dikarenakan apabila tata kelola perusahaan sudah baik dan terpercaya otomatis perusahaan tersebut akan selalu berusaha agar kelangsungan hidup perusahaan dapat terjaga misalnya dengan tidak menyajikan laba yang *overstatement*. Selain itu juga tujuan perusahaan dapat tercapai, serta dapat menarik investor lain untuk menanamkan dananya ke dalam perusahaan. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin baik tata kelola perusahaan maka semakin tinggi juga tingkat penerapan konservatisme akuntansi.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:96), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah tersebut dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan oleh peneliti, teori yang relevan, dan *review* atas hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian ini, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut.

2.4.1. Set Kesempatan Investasi Mempengaruhi Konservatisme

Akuntansi Sebelum Dan Sesudah Konvergensi IFRS (H₁)

Akuntansi secara tradisional tidak merespon perubahan nilai pertumbuhan dan aset tak berwujud perusahaan. Akuisisi dan perubahan nilai akibat penurunan nilai dari aset biasanya tidak dicatat kecuali secara eksternal diperoleh dan dapat diverifikasi (seperti *goodwill* manajer dan akuisisi). Konsekuensinya apabila terjadi penurunan nilai aset yang tidak dicatat, maka perusahaan tidak dapat mengakuinya. Hal tersebut mengarahkan perusahaan pada tingkat konservatisme yang rendah terutama ketika nilai perusahaan

dipengaruhi oleh nilai pertumbuhan dan nilai aset tidak berwujud perusahaan. Maka dari itu, secara singkat dapat dikatakan bahwa set kesempatan investasi yang semakin besar atau tinggi akan rawan dengan adanya penurunan nilai aset terutama aset tidak berwujud yang tidak diakui, dan secara otomatis akan mempengaruhi penerapan konservatisme akuntansi dalam penyajian laporan keuangannya. Sehingga hal ini menunjukkan semakin tinggi set kesempatan investasi maka akan semakin tinggi juga tingkat konservatisme akuntansinya (Saputri, 2013). Berikut adalah hipotesis satu (H_1) yang peneliti rumuskan:

H_{1a} : set kesempatan investasi mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum konvergensi IFRS.

H_{1b} : set kesempatan investasi mempengaruhi konservatisme akuntansi sesudah konvergensi IFRS.

2.4.2. Kepemilikan Institusional Mempengaruhi Konservatisme Akuntansi Sebelum Dan Sesudah Konvergensi IFRS (H_2)

Semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusional pada suatu perusahaan maka semakin kuat juga pengawasan yang dilakukan oleh pihak institusi lain terhadap kinerja manajemen perusahaan. Hal itu dilakukan untuk menekan perilaku oportunistik dari manajer, seperti untuk mengejar bonus. Sehingga semakin besar porsi kepemilikan institusional maka semakin besar pula tekanan bagi perusahaan untuk menerapkan prinsip konservatisme akuntansi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Harahap (2012) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip akuntansi yang konservatif pada penyusunan laporan keuangan akan semakin tinggi apabila kepemilikan saham oleh pihak institusional tinggi. Investor institusional akan memiliki hak yang lebih besar sehingga investor institusional akan mengawasi tindakan dan kinerja manajemen lebih ketat, sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba dan cenderung meminta manajemen untuk menerapkan akuntansi yang konservatif, dan terhindar dari penyajian laba yang *overstatement*. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan

institusional maka akan semakin tinggi juga penerapan konservatisme akuntansi. Berikut adalah hipotesis dua (H_2) yang peneliti rumuskan:

H_{2a} : kepemilikan institusional mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum konvergensi IFRS.

H_{2b} : kepemilikan institusional mempengaruhi konservatisme akuntansi sesudah konvergensi IFRS.

2.4.3. Kesulitan Keuangan Mempengaruhi Konservatisme Akuntansi Sebelum Dan Sesudah Konvergensi IFRS (H_3)

Dalam teori akuntansi positif menyebutkan bahwa manajer akan cenderung mengurangi penerapan konservatisme akuntansi apabila perusahaan mengalami tingkat kesulitan keuangan (*financial distress*) yang tinggi (Suprihastini dan Pusparini, 2007 dalam Noviantari dan Ratnadi, 2015). *Financial distress* dapat mendorong pemegang saham untuk mengganti manajer perusahaan karena kinerja manajer dianggap buruk dan tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik, sehingga hal ini secara otomatis mendorong manajer untuk mengurangi penerapan konservatisme akuntansi dan justru cenderung melakukan manajemen laba agar kinerjanya dapat terlihat baik dan agar dapat menarik kreditor ataupun investor agar mau menanamkan dananya kepada perusahaan agar perusahaan tetap dapat bertahan dan tidak bangkrut. Sehingga seperti yang dinyatakan oleh Lo (2005) dalam Noviantari dan Ratnadi (2015), bahwa semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan maka mendorong manajer untuk menyajikan laporan keuangan yang semakin tidak konservatif. Berikut adalah hipotesis tiga (H_3) yang peneliti rumuskan:

H_{3a} : kesulitan keuangan mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum konvergensi IFRS.

H_{3b} : kesulitan keuangan mempengaruhi konservatisme akuntansi sesudah konvergensi IFRS.

2.4.4. Kontrak Hutang Mempengaruhi Konservatisme Akuntansi Sebelum Dan Sesudah Konvergensi IFRS (H₄)

Debt covenant hypothesis atau kontrak hutang dalam teori akuntansi positif menyatakan bahwa manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba (Sweeney, 1994 dalam Ayuningsih *et al.*, 2016). Menurut Oktomegah (2012), *debt covenant* memprediksi bahwa manajer cenderung untuk menyatakan laba dan aset secara berlebihan untuk mengurangi renegotiasi biaya kontrak hutang ketika perusahaan berusaha melanggar kontrak hutangnya, dan manajer juga tidak ingin kinerjanya dinilai kurang baik apabila laba yang dilaporkan konservatif. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lasdi (2009) dimana penggunaan *leverage* sebagai proksi dari *debt covenant* yang menunjukkan kecenderungan perusahaan untuk melanggar perjanjian hutang. Semakin tinggi rasio *leverage* maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan akan menggunakan prosedur yang dapat meningkatkan laba yang disajikan dalam laporan keuangan (Sari dan Adhariani, 2009). Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi *debt covenant* maka semakin rendah penerapan prinsip konservatisme akuntansi. Berikut adalah hipotesis empat (H₄) yang peneliti rumuskan:

H_{4a} : kontrak hutang mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum konvergensi IFRS.

H_{4b} : kontrak hutang mempengaruhi konservatisme akuntansi sesudah konvergensi IFRS.

2.4.5. Kontrak Kompensasi Mempengaruhi Konservatisme Akuntansi Sebelum Dan Sesudah Konvergensi IFRS (H₅)

Kepemilikan manajerial merupakan proksi dari kontrak kompensasi dalam penelitian ini. Struktur kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajerial yang lebih besar atau tinggi dibandingkan dengan pihak eksternal perusahaan akan menyebabkan perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi

yang konservatif. Hal ini dikarenakan manajemen memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang juga sekaligus untuk memenuhi keinginannya sendiri, jadi tidak hanya memikirkan besarnya bonus yang akan didapat tapi juga mementingkan kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*). Begitupun sebaliknya, apabila kepemilikan manajerialnya rendah maka manajer cenderung lebih tidak konservatif agar kinerjanya terlihat baik oleh pihak eksternal perusahaan dan manajer juga akan mendapatkan bonus yang besar. Hal ini lah yang mendorong manajer akan melaporkan laba lebih besar (Suaryana, 2008). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial maka semakin tinggi pula penerapan konservatisme akuntansi. Berikut adalah hipotesis lima (H_5) yang peneliti rumuskan:

H_{5a} : kontrak kompensasi mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum konvergensi IFRS.

H_{5b} : kontrak kompensasi mempengaruhi konservatisme akuntansi sesudah konvergensi IFRS.

2.4.6. Litigasi Mempengaruhi Konservatisme Akuntansi Sebelum Dan Sesudah Konvergensi IFRS (H_6)

Pernyataan yang berlebihan dari aset bersih cenderung menghasilkan biaya litigasi yang lebih besar dibandingkan dengan pernyataan aset bersih yang lebih rendah. Penerapan konservatisme akuntansi dengan menyatakan aset bersih yang lebih rendah dapat mengurangi risiko litigasi (Watts, 2003a dalam Lasdi 2009). Selain itu, risiko litigasi juga didukung oleh lingkungan hukum suatu wilayah. Dimana pada lingkungan hukum yang sangat ketat, maka manajer cenderung menyajikan laporan keuangannya secara konservatif agar terhindar dari ancaman tuntutan hukum atau litigasi. Begitupun sebaliknya, pada lingkungan hukum yang longgar maka dorongan manajer untuk menyajikan laporan keuangan secara konservatif akan berkurang (Francis *et al.*, 1994 dalam Nugroho, 2012). Berbagai peraturan dan penegakan hukum yang berlaku dalam lingkungan akuntansi, menuntut manajer untuk

lebih mencermati praktik – praktik akuntansi agar terhindar dari ancaman tuntutan hukum. Tuntutan penegakan hukum yang semakin ketat inilah yang dapat berpotensi menimbulkan litigasi bila perusahaan melakukan pelanggaran sehingga akan semakin mendorong manajer untuk bersikap konservatif dalam menyajikan laporan keuangannya. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin tinggi risiko ancaman litigasi maka semakin tinggi juga dorongan manajer untuk menerapkan konservatisme akuntansi. Berikut adalah hipotesis enam (H_6) yang peneliti rumuskan:

H_{6a} : litigasi mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum konvergensi IFRS.

H_{6b} : litigasi mempengaruhi konservatisme akuntansi sesudah konvergensi IFRS.

2.4.7. Pajak Mempengaruhi Konservatisme Akuntansi Sebelum Dan Sesudah Konvergensi IFRS (H_7)

Dalam hal pembayaran pajak penghasilan, terdapat konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pemerintah dimana pemerintah menginginkan perusahaan dapat melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar dan sesuai dengan besarnya laba yang dihasilkan namun dari sisi manajer justru menginginkan pembayaran pajak penghasilan yang rendah. Oleh karena itu, adanya keinginan manajer untuk membayar pajak penghasilan dengan lebih rendah dapat mendorong manajer untuk menerapkan konservatisme akuntansi dalam penyajian laporan keuangannya terutama yang berkaitan dengan laba yang disajikan, karena laba yang disajikan menjadi ukuran dalam pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Maka, dalam mengukur pajak pada penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan yang berhubungan langsung dengan laba, yang diharapkan dapat melihat apakah semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan yang dapat menunjukkan laba yang semakin besar pula, dan secara otomatis membuat pajak penghasilan yang harus dibayarkan semakin besar. Maka semakin besar atau tinggi pajak penghasilan yang harus dibayarkan maka semakin tinggi pula penerapan konservatisme

akuntansinya. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Widya (2004) dalam Dewi *et al.*, (2014) bahwa suatu perusahaan dengan pajak yang besar akan cenderung memilih akuntansi yang konservatif. Berikut adalah hipotesis tujuh (H₇) yang peneliti rumuskan:

H_{7a} : pajak mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum konvergensi IFRS.

H_{7b} : pajak mempengaruhi konservatisme akuntansi sesudah konvergensi IFRS.

2.4.8. Biaya Politis Mempengaruhi Konservatisme Akuntansi Sebelum Dan Sesudah Konvergensi IFRS (H₈)

Sama halnya seperti pajak, biaya politis juga berkaitan dengan ukuran perusahaan. Dimana perusahaan besar biasanya mendapat pengawasan yang lebih dari pemerintah dan masyarakat sehingga menghadapi biaya politis lebih besar dibanding perusahaan kecil. Biaya politis mencakup semua biaya (transfer kekayaan) yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan tindakan politis antara lain seperti tuntutan buruh, sumbangan untuk partai politik, dan lain sebagainya. Proses pengalihan kekayaan tersebut biasanya menggunakan informasi akuntansi, seperti laba perusahaan. Jika perusahaan besar menghasilkan laba yang besar secara relatif permanen, maka pemerintah dapat terdorong untuk menaikkan pajak dan meminta layanan publik yang lebih tinggi kepada perusahaan (Lo, 2005 dalam Wilantoro, 2010). Hal ini lah yang mendorong manajemen perusahaan untuk menerapkan konservatisme akuntansi. Manajer memiliki kecenderungan untuk memperkecil laba yang disajikan dalam laporan keuangan guna mengurangi biaya politis yang potensial (Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Lasdi, 2009). Timbulnya biaya politis ini juga disebabkan karena adanya konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan pengalihan kekayaan dari perusahaan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku baik peraturan perpajakan maupun peraturan lainnya (Oktomegah, 2012). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi biaya politis

yang dihadapi perusahaan maka semakin tinggi penerapan konservatisme akuntansi. Berikut adalah hipotesis delapan (H_8) yang peneliti rumuskan:

H_{8a} : biaya politis mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum konvergensi IFRS.

H_{8b} : biaya politis mempengaruhi konservatisme akuntansi sesudah konvergensi IFRS.

2.4.9. Tata Kelola Perusahaan Mempengaruhi Konservatisme Akuntansi Sebelum Dan Sesudah Konvergensi IFRS (H_9)

Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik dan terpercaya maka cenderung perusahaan tersebut akan menerapkan konservatisme akuntansi dalam penyajian laporan keuangannya. Dan begitu pun sebaliknya, apabila perusahaan belum memiliki tata kelola yang baik dan terpercaya maka perusahaan cenderung tidak menerapkan konservatisme akuntansi. Hal ini dikarenakan apabila tata kelola perusahaan sudah baik dan terpercaya otomatis perusahaan tersebut akan selalu berusaha agar kelangsungan hidup perusahaan dapat terjaga misalnya dengan tidak menyajikan laba yang *overstatement*. Selain itu juga perusahaan akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin baik tata kelola perusahaan maka semakin tinggi juga tingkat penerapan konservatisme akuntansi. Berikut adalah hipotesis sembilan (H_9) yang peneliti rumuskan:

H_{9a} : tata kelola perusahaan mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum konvergensi IFRS.

H_{9b} : tata kelola perusahaan mempengaruhi konservatisme akuntansi sesudah konvergensi IFRS.

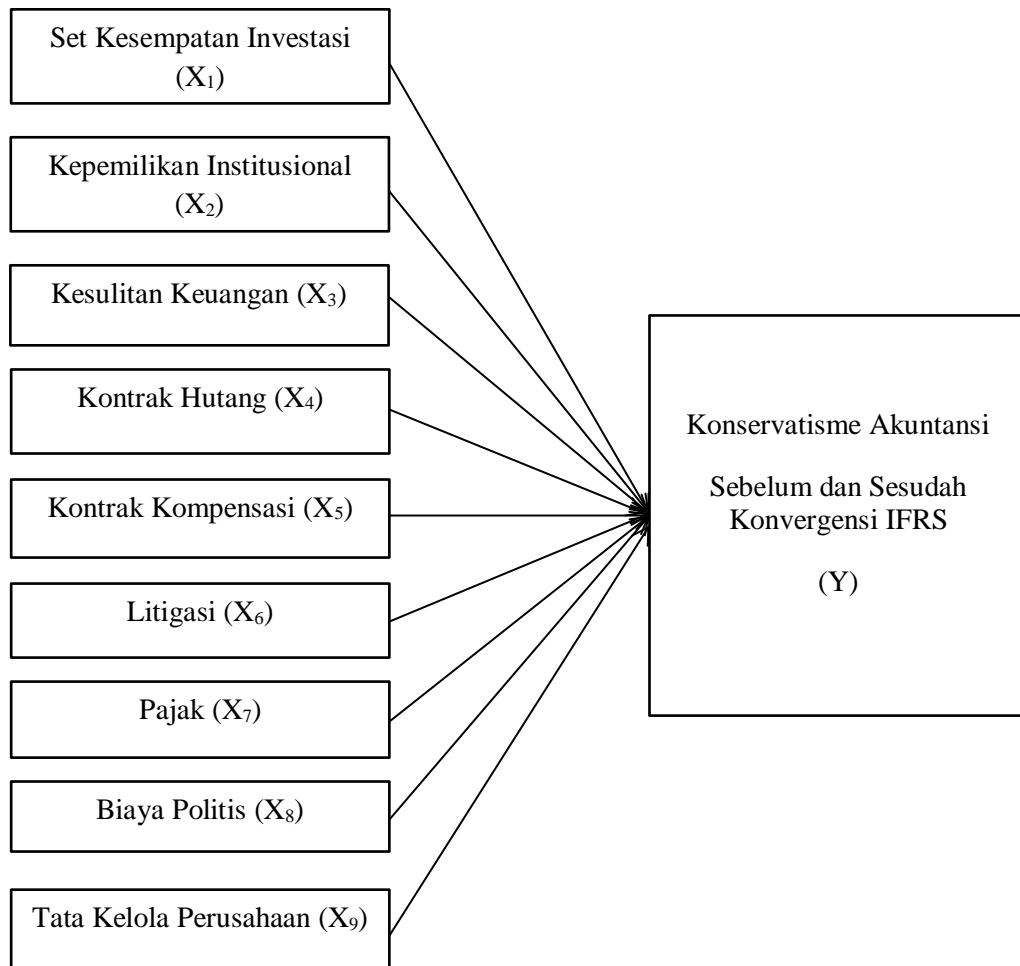
2.4.10. Terdapat Perbedaan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Konservatisme Akuntansi Sebelum Dan Sesudah Konvergensi IFRS (H₁₀)

Tujuan dilakukannya konvergensi IFRS adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di semua negara dengan mengacu pada suatu standar utama yang sama serta dapat meningkatkan arus investasi global melalui laporan keuangan yang dapat diperbandingkan antar satu negara dengan negara lainnya. Oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang juga tidak dapat menolak untuk melakukan konvergensi IFRS agar PSAK memiliki isi yang sama dengan IFRS dan agar Indonesia memiliki kualitas laporan keuangan yang dapat diperbandingkan dengan negara lain sehingga memudahkan Indonesia untuk menarik investor asing. Dengan adanya konvergensi IFRS di Indonesia ini membuat konservatisme akuntansi memiliki isu baru yaitu apakah dengan adanya konvergensi IFRS ini membuat penerapan konservatisme akuntansi menjadi berkurang atau bahkan menghilang, atau justru sebaliknya malah menjadi semakin bertambah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan melakukan analisis terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi baik sebelum maupun sesudah konvergensi IFRS. Mungkin saja faktor – faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum konvergensi IFRS menjadi tidak berpengaruh setelah adanya konvergensi IFRS atau sebaliknya. Seperti yang dinyatakan oleh Sinta (2016), bahwa terdapat perbedaan tingkat konservatisme akuntansi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS, dimana tingkat konservatisme akuntansi sesudah konvergensi IFRS lebih tinggi dari pada sebelum konvergensi IFRS. Berikut adalah hipotesis sepuluh (H₁₀) yang peneliti rumuskan:

H₁₀ : terdapat perbedaan faktor – faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh peneliti mengenai hubungan antar variabel, maka dapat dibuat kerangka konseptual penelitian seperti di bawah ini:



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian